

Global Economy Brief

**Agustus
/2021**



**CENTER FOR INDONESIA
TAXATION ANALYSIS**

For A Better Tax Policy

Contents

NEWS	OPINION
<p>Treasury Seeks to Quell Fears Crypto Tax Rules are Overly Broad Bloomberg, 14 Agustus 2021 By: Christopher Condon and Laura Davidson (3)</p>	<p>Does Perishable e-Money Represent the Future of Fiscal Stimulus? The Economist, 7 Agustus 2021 (6)</p>
<p>Elizabeth Warren Will Propose a Minimum Tax on the Nation's Richest Companies The New York Times, 9 Agustus 2021 By: Emily Cochrane (3)</p>	<p>America's Child Tax Credit Bonanza Project Syndicate, 17 Agustus 2021 By: Todd G. Buchholz and Victoria J. B (6)</p>
<p>Democrats Seek \$500 Billion in Climate Damages from Big Polluting Companies New York Times, 4 Agustus 2021 By: Lisa Friedman (4)</p>	<p>Why Aviation Should Embrace Carbon Taxation Project Syndicate, 19 Agustus 2021 By: Adair Turner (7)</p>
	<p>Tantangan Lawas-Baru Utang Negara Project Syndicate, 10 Agustus 2021 By: José Antonio Ocampo (8)</p>
	<p>Tax Hikes and Covid Can't Stop Trapped Saudis from Spending Bloomberg, 8 Agustus 2021 By: Vivian Nereim (8)</p>

NEWS

Treasury Seeks to Quell Fears Crypto Tax Rules are Overly Broad

Bloomberg, 14 Agustus 2021

By: Christopher Condon and Laura Davidson

Menanggapi kekusaran para pengguna mata uang elektronik terhadap RUU infrastruktur yang telah diloloskan Senat, Kementerian Keuangan Amerika segera meluruskan bahwa tuntutan pelaporan yang diatur di dalamnya hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang merupakan pialang mata uang elektronik. Pihak Kementerian Keuangan sendiri yang akan menentukan apakah suatu perusahaan itu berdasarkan aktivitasnya dapat dikategorikan sebagai *broker* atau tidak menurut UU, terlepas dari bagaimana perusahaan itu mengidentifikasi diri.

Keterangan Kementerian Keuangan ini harapannya dapat mengatasi kekusaran pihak-pihak yang terjun ke dalam bisnis mata uang elektronik yang mengira mereka perlu melaporkan aset digital mereka padahal mereka tidak memiliki kelengkapan data untuk itu. Kebijakan itu sendiri diestimasikan akan mendatangkan pemasukan pajak tambahan sebesar 28 miliar USD dalam rentang satu dekade yang akan digunakan untuk mendanai pembangunan jalan dan jembatan.

Rumusan RUU yang mensyaratkan pialang untuk membuat laporan atas aset digitalnya memang dikritik beberapa pihak karena ambiguitasnya. Kekhawatirannya adalah definisi “pialang” dapat diperluas hingga mencakup terlalu banyak bisnis di dalamnya. Dalam konteks ini, petunjuk dari Kementerian Keuangan di atas berupaya menjernihkan definisi pialang sebagai badan usaha yang melakukan transaksi aset digital untuk kepentingan pihak-pihak lain. Peraturan yang menuntut pelaporan aset digital ini sendiri merupakan bagian dari upaya untuk memberantas pengemplangan pajak dan dengan begitu diharapkan dapat menekan tingkat *tax gap*.

William Quikley, salah seorang pendiri aset digital Thether, menganggap bahwa kekusaran terhadap RUU ini berlebihan. Lagi pula, andai pun berhasil diteken, RUU ini baru akan berlaku pada tahun 2023. Dengan ini perusahaan-perusahaan yang terjun ke dalam bisnis mata uang elektronik masih memiliki waktu untuk memperbaiki sistem mereka dan mempersiapkan data-data yang perlu dilaporkan.

Sumber:

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-13/treasury-seeks-to- quell-fears-crypto-tax-rules-are-overly-broad?sref=r2r3G73s>

Elizabeth Warren Will Propose a Minimum Tax on the Nation’s Richest Companies

The New York Times, 9 Agustus 2021

By: Emily Cochrane

Elizabeth Warren, salah seorang senator Amerika Serikat, mengusulkan agar dalam rencana anggaran sebesar 3,5 triliun USD yang diajukan Partai Demokrat, disisipkan agenda untuk mengenakan pajak minimum terhadap perusahaan-perusahaan paling kaya di Amerika. Perusahaan-perusahaan itu nantinya dituntut untuk membayar pajak sebesar 7% dari total pemasukan yang mereka laporkan kepada investor. Dengan mengenakan pajak terhadap pemasukan yang dilaporkan kepada investor dan bukan pemasukan yang dilaporkan kepada IRS, perusahaan-perusahaan dituntut untuk membayar pajak berdasarkan angka pemasukan yang mereka upayakan untuk tampak besar dan bukan angka yang sebisa mungkin mereka buat kecil.

Selepas meloloskan rencana anggaran infrastruktur sebesar 1 triliun USD, Partai Demokrat kini berupaya untuk meloloskan rencana anggaran baru yang akan mengenakan pajak lebih kepada para konglomerat dan perusahaan-perusahaan besar untuk kemudian mengalokasikannya untuk meningkatkan jaring pengaman sosial (*social safety net*). Urgensi agenda ini diperkuat oleh temuan ProPublica yang menunjukkan betapa kecilnya pajak yang dibayarkan oleh orang-orang paling kaya di Amerika. Jika usulan ini berhasil diloloskan, maka diestimasikan ada 1.300 perusahaan yang akan terdampak dan ada 700 miliar USD tambahan pemasukan pajak antara tahun 2023 hingga 2032.

Sumber:

<https://www.nytimes.com/2021/08/09/us/politics/elizabeth-warren-minimum-tax-corporations.html?searchResultPosition=1>

Democrats Seek \$500 Billion in Climate Damages from Big Polluting Companies

New York Times, 4 Agustus 2021

By: Lisa Friedman

Partai Demokrat sedang mengajukan pajak baru terhadap perusahaan-perusahaan MIGAS atas dasar keyakinan bahwa perusahaan-perusahaan itu bertanggung jawab atas bencana-bencana alam yang berkaitan dengan perubahan iklim. Dalam *draft* yang sekarang, Kementerian Keuangan dan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat akan diberi wewenang untuk menunjuk perusahaan-perusahaan mana saja yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar antara tahun 2000 hingga 2019 dan mengenakan pajak secara proporsional berdasarkan penghitungan itu. Dana sebesar 500 miliar USD yang dapat dihasilkan dari pajak itu akan dialokasikan untuk pengembangan energi ramah lingkungan dan peningkatan bantuan tanggap bencana.

Rencana ini diajukan di tengah agenda Senat untuk meloloskan RUU infrastruktur yang meliputi anggaran untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem yang disebabkan oleh perubahan iklim. Partai Demokrat sendiri berharap agar setelah ini dapat meloloskan RUU lain yang ditujukan untuk menekan tingkat produksi karbondioksida dan gas rumah kaca imbas pembakaran bahan bakar fosil. Pajak terhadap perusahaan-perusahaan minyak dan gas sendiri telah disetujui oleh semua anggota Partai Demokrat dan harapannya dapat diloloskan bahkan tanpa sokongan dari anggota Partai Republik sekalipun.

Kendati sejumlah perusahaan minyak besar, Chamber of Commerce Amerika, dan American Petroleum Institute mendukung rencana pajak baru ini, beberapa pihak lainnya masih menganggap pajak itu tidak adil.

Suatu penelitian tahun 2018 sendiri mendapati bahwa penyebab terbesar pemanasan global adalah emisi gas rumah kaca yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil, seperti dalam pembangkit listrik, industri, dan transportasi. Sebagai kesimpulan, penelitian itu memperingatkan bahwa cuaca-cuaca ekstrem yang diperparah oleh pemanasan global ini akan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi Amerika di tahun-tahun mendatang. Dalam konteks semacam ini, para pegiat lingkungan hidup telah lantang menunjuk perusahaan-perusahaan MIGAS sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas perubahan iklim.

Pajak baru yang diajukan Partai Demokrat nantinya akan menysasar perusahaan-perusahaan yang menyumbangkan setidaknya 0,05 persen dari total emisi karbondioksida dan gas metana dalam kurun tahun 2000 hingga 2019. Artinya, hanya sekitar 25 hingga 30 perusahaan saja yang akan dikenai pajak itu. Sasaran pajak itu juga terbatas pada perusahaan-perusahaan Amerika maupun perusahaan-perusahaan asing yang memiliki anak perusahaan di Amerika.

Menurut Richard J. Lazarus, seorang akademisi dari Harvard University, pajak yang diusulkan Partai Demokrat itu menyerupai kebijakan yang pernah diberlakukan pada tahun 1980 di mana perusahaan-perusahaan yang menyumbang banyak polusi dipaksa membayar biaya untuk membersihkan tempat-tempat yang tercemar. Perusahaan-perusahaan kimia kala itu menggugat legalitas kebijakan tersebut namun tidak berhasil. Oleh sebab itulah ia optimis bahwa pajak baru itu juga akan dapat berdiri jika digugat secara hukum.

Sumber:

<https://www.nytimes.com/2021/08/04/climate/tax-polluting-companies-climate.html?searchResultPosition=3>

OPINION**Does Perishable e-Money Represent the Future of Fiscal Stimulus?**

The Economist, 7 Agustus 2021

Pada 1 Agustus, warga Hong Kong menerima angsuran pertama dari voucher konsumsi pemerintah, sebuah upaya untuk menghidupkan kembali industri ritel. Jumlahnya sebesar (HK\$5.000 atau \$640). Uang tersebut ditambahkan atau dibayarkan ke aplikasi pembayaran elektronik, seperti Alipay.

Setelah Korea Selatan memberikan voucher yang tidak tahan lama pada Mei 2020, hanya 36% rumah tangga yang mengatakan bahwa mereka telah meningkatkan pengeluaran ritel mereka. Berbeda dengan Taiwan yang membagikan voucher fisik pada tahun 2009, sekitar seperempat orang menggunakannya untuk pembelian yang tidak direncanakan, hal ini menyebabkan ketidakefektifan daripada potongan pajak Amerika yang lebih konvensional pada tahun 2008.

Kekurangan ini tidak akan mengejutkan para pendukung "hipotesis pendapatan permanen", pencetus hipotesis pendapatan permanen tidak lain adalah Milton Friedman. Dalam model ini, sebagian besar keuntungan dihilangkan, sehingga warga Hong Kong tidak dapat menyisihkan uang dari voucher tersebut.

Sumber:

<https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/08/07/does-perishable-e-money-represent-the-future-of-fiscal-stimulus>

America's Child Tax Credit Bonanza

Project Syndicate, 17 Agustus 2021

By: Todd G. Buchholz and Victoria J. Buchholz

Sebagai bagian dari American Rescue Plan, Pemerintah Amerika Serikat berencana menetapkan kebijakan *Child Tax Credit* (CTC) di mana rumah tangga yang berpenghasilan hingga 150 ribu USD/tahun akan menerima subsidi setiap bulan sebesar 300 USD untuk setiap anak di bawah enam tahun atau 250 USD untuk setiap anak yang berusia di antara enam hingga tujuh belas tahun. Bagi rumah tangga yang penghasilannya di atas 400 ribu USD/tahun, subsidi yang disediakan adalah sebesar 167 USD per anak setiap bulannya. CTC ini berbeda dari kebijakan American Rescue Plan lainnya karena kebijakan ini rencananya akan dibuat berkelanjutan.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu banyak rumah tangga untuk membayar biaya tempat tinggal, biaya pendidikan, serta perawatan anak. Subsidi ini terutama berarti bagi rumah tangga yang memiliki anak di bawah usia sekolah mengingat harga kebutuhan-kebutuhan pokok bagi mereka, seperti popok, sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengerem penurunan angka pertumbuhan penduduk yang terjadi beberapa tahun belakang.

Di sisi lain, kebijakan subsidi ini juga membuka banyak peluang bagi dunia bisnis. Hal ini terutama berdampak bagi bisnis-bisnis yang memiliki sumber pemasukan berkelanjutan atau "pemasukan berulang-ulang" (*recurring revenue*) melalui layanan langganan seperti Netflix atau Apple. Perusahaan-perusahaan semacam itu mesti menyesuaikan harga yang ia tawarkan untuk produknya dengan besaran subsidi dari pemerintah agar mampu menarik lebih banyak konsumen usia muda. Harapannya, subsidi yang disediakan dapat membantu membuat biaya bulanan yang perlu dikeluarkan oleh konsumen untuk suatu produk menjadi lebih ringan.

Apabila akhirnya perusahaan-perusahaan itu berhasil menarik konsumen-konsumen muda baru, hal itu akan sangat menguntungkan bagi mereka sebab jika seorang anak muda sudah terbiasa menggunakan produk dari merek tertentu, ia cenderung akan setia menggunakan produk merek itu untuk seterusnya. Prospek itu akan tampak lebih menguntungkan lagi apabila diperhatikan juga bahwa konsumen-konsumen dari Generasi Z memiliki “nilai rentang usia konsumen” (*customer lifetime value*) yang lebih tinggi dibandingkan konsumen-konsumen Generasi X. Di sini, bukan hanya perusahaan-perusahaan dagang saja yang dapat mendulang manfaat dari kebijakan subsidi tersebut, melainkan juga perusahaan-perusahaan jasa atau bahkan lembaga-lembaga keuangan.

Sumber:

<https://www.project-syndicate.org/commentary/us-child-tax-credit-recurring-revenue-opportunities-for-business-by-todd-g-buchholz-and-victoria-j-buchholz-2021-08>

Why Aviation Should Embrace Carbon Taxation

Project Syndicate, 19 Agustus 2021

By: Adair Turner

Bencana banjir di Jerman dan Tiongkok merupakan ancaman global yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Dalam menanggapi, kita harus memperkuat ketahanan terhadap peristiwa cuaca ekstrem dan mempercepat pengurangan emisi karbon dioksida. Uni Eropa membuat kebijakan untuk mengurangi emisi sebesar 55% dari tingkat tahun 1990 pada tahun 2030. Langkah tersebut mencakup penetapan harga karbon, dengan pembatasan emisi yang lebih ketat dalam skema perdagangan UE, seperti penghapusan tunjangan bebas emisi untuk industri berat dan pajak atas bahan bakar jet penerbangan konvensional untuk penerbangan intra-Eropa.

Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) berargumen bahwa pajak bukanlah jawaban untuk keberlanjutan penerbangan. Faktanya, industri penerbangan harus merangkul penetapan harga karbon sebagai alat yang ampuh untuk mencapai pengurangan emisi dengan biaya minimal.

Dekarbonisasi membuat konsumen menjadi lebih baik dalam beberapa sektor. Misalnya, pengemudi di Eropa akan beranggapan bahwa kendaraan listrik lebih efisien daripada mobil bertenaga bensin atau diesel. Namun, beberapa sektor yang “sulit dikurangi”, dekarbonisasi akan menimbulkan biaya.

IATA berpendapat, bahwa pajak karbon akan menyerap uang dari industri yang mendukung investasi pengurangan emisi dalam pembaruan armada dan teknologi. Hal ini mencerminkan ketidaktepatan bahwa pajak meningkatkan biaya dan mengurangi keuntungan perusahaan. Jika pajak bahan bakar jet konvensional diperkenalkan secara bertahap, seperti yang diusulkan UE, kenaikan biaya akan diteruskan ke pelanggan dalam bentuk harga tiket yang lebih tinggi.

Jika sejak lama telah menerapkan harga yang lebih tinggi untuk bahan bakar jet konvensional, maka akan menciptakan bisnis yang solid untuk memproduksi bahan bakar nabati atau bahan bakar sintetis, memacu inovasi, dan memungkinkan industri untuk mencapai skala ekonomi dan mengurangi biaya. Ekspektasi biaya bahan bakar yang lebih tinggi di masa depan akan mendorong peningkatan desain mesin dan pesawat. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar sebesar 30-40%.

Sumber:

<https://www.project-syndicate.org/commentary/why-aviation-should-embrace-carbon-taxation-by-adair-turner-2021-08>

Tantangan Lawas-Baru Utang Negara

Project Syndicate, 10 Agustus 2021

By: José Antonio Ocampo

Salah satu dari banyak warisan kompleks pandemi COVID-19 adalah tingginya tingkat utang sektor publik di sebagian besar negara. Hal ini mencerminkan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk mengatasi krisis, serta jatuhnya pendapatan pajak karena ekonomi meledak pada tahun 2020. Akibatnya, banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah berisiko mengalami kesulitan utang negara. IMF dan berbagai negara lain sudah berupaya untuk dapat menghadapinya seperti dengan restrukturisasi utang.

Tidak semua negara berkembang perlu merestrukturisasi utang mereka. Faktanya, salah satu fitur penting dari krisis saat ini adalah bahwa aliran modal swasta ke ekonomi ini kembali dengan cepat. Namun, menurut sebuah analisis, dari 120 negara berkembang 90% merupakan risiko tinggi dan spekulatif, dan lebih dari setengah dari semua pembayaran utang jatuh tempo pada 2021-22.

Pembuat kebijakan internasional harus mengejar dua tujuan yang harus saling memperkuat. Mereka perlu meningkatkan partisipasi kreditur swasta secara penuh, adil, dan transparan dalam reprofiling dan restrukturisasi utang bila diperlukan. Dan mereka harus memberikan dukungan keuangan tambahan yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk mempertahankan investasi mereka dalam pembangunan berkelanjutan.

Namun, mekanisme restrukturisasi utang harus dilengkapi dengan pengaturan arus modal yang memadai. Ketika dunia berupaya memetakan pemulihan ekonomi dari krisis COVID-19 pada tahun 2021, masalah terkait utang ini harus menjadi pusat agenda kerja sama global.

Sumber:

<https://www.project-syndicate.org/commentary/developing-countries-sovereign-debt-distress-two-responses-by-jose-antonio-ocampo-2021->

Tax Hikes and Covid Can't Stop Trapped Saudis From Spending

Bloomberg, 8 Agustus 2021

By: Vivian Nereim

Penuhnya reservasi dan telepon yang terus berdering di salah satu restoran Perancis kelas atas dan ternama di Riyadh menjadi salah satu tanda bahwa ekonomi Saudi mulai *rebound* dan tingkat konsumsi yang meningkat. Minimnya permintaan bantuan internasional dan berkurangnya program bantuan bagi rakyat miskin menjadi langkah awal yang dilakukan Arab Saudi, sehingga memunculkan prediksi bahwa pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

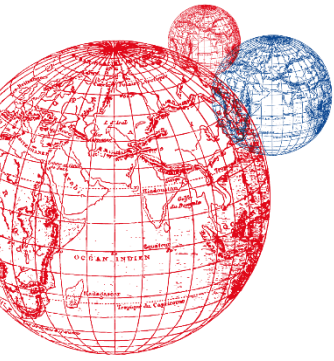
Terlebih pembatasan perjalanan internasional yang sangat ketat dan sedikitnya tempat wisata di Arab Saudi, membuat konsumsi masyarakat sangat tertahan. Kebijakan ketat untuk warga yang belum divaksinasi padahal tingkat vaksinasi masih rendah juga menjadi tantangan lain pada tingkat konsumsi. Namun kenaikan harga minyak dan percepatan kampanye vaksinasi telah mendorong pemulihan, dikatalisasi oleh warga Saudi yang menghabiskan liburan mereka di rumah. Goldman Sachs Group Inc. menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB menjadi 4,5% tahun ini sebelumnya 2,5%.

Belanja konsumen naik 3,3% pada semester pertama dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Selama pekan yang berakhir 3 Juli, pembayaran elektronik di restoran dan kafe mencapai rekor 1,4 miliar riyal. Monica Malik, kepala ekonom untuk Bank Komersial Abu Dhabi, memperkirakan

produk domestik bruto tahun ini akan melebihi tingkat nominal tahun 2019, yang “benar-benar menunjukkan seberapa cepat Saudi bangkit kembali,” katanya.


Sumber:

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-08/saudi-arabians-trapped-at-home-lift-covid-blues-for-business>



Contact Us:

 @CITA_Research

 @cita_risetfiskal

 @CITAREsearch

 CITA Research

